

## **Respon Pemerintah Tiongkok Terhadap Penyebaran Sistem Pertahanan Anti-Rudal *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* Amerika Serikat di Korea Selatan**

**Choirul Fahmi Akbar<sup>1</sup>, Ismah Rustam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Fahmiakbar.c@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The United States of America has developed an anti-missile defense system that can prevent air-based military threats, thus avoiding a potential nuclear war. This system also applies to US-backed countries with a greater risk of nuclear war, including South Korea. In South Korea, the US has deployed an anti-missile defense system called Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), in response to North Korea's threat. This deployment has invited responses from other major power including China. This research aims to investigate the PRC government's responses. Using a descriptive qualitative method, this research has found that the US deployment of THAAD has rendered China to implement a balancing strategy by increasing its military capabilities and conducting military cooperation with other countries to prevent the influence of US forces in the East Asia Region.*

**Keywords:** *Balance of Threat, Balancing Strategy, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*

### **ABSTRAK**

Amerika Serikat telah mengembangkan sistem pertahanan antirudal yang dapat mencegah ancaman militer berbasis udara, sehingga menghindari potensi perang nuklir. Sistem ini juga berlaku di negara-negara dukungan AS yang memiliki risiko perang nuklir lebih besar, termasuk Korea Selatan. Di Korea Selatan, AS telah mengerahkan sistem pertahanan antirudal yang disebut Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), sebagai tanggapan atas ancaman Korea Utara. Penyebaran ini telah mengundang tanggapan dari kekuatan besar lainnya termasuk Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tanggapan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa penyebaran THAAD oleh AS telah membuat Tiongkok menerapkan strategi penyeimbang dengan meningkatkan kemampuan militernya dan melakukan kerja sama militer dengan negara lain untuk mencegah pengaruh pasukan AS di Kawasan Asia Timur.

**Kata Kunci:** *Keseimbangan Ancaman, Strategi Perimbangan, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).*

### **PENDAHULUAN**

Amerika Serikat (AS) memiliki teknologi keamanan yang cukup besar pengaruhnya di Kawasan Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea. Perseteruan di Kawasan Semenanjung Korea ini sedang hangat diperbincangkan di kancah internasional karena adanya intervensi dari beberapa negara yaitu Tiongkok, Rusia, dan AS. Semenanjung Korea merupakan daerah yang saat ini sedang mengalami konflik yang berkepanjangan. AS yang merupakan negara *super power* hingga saat ini menjadi negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di Kawasan Semenanjung Korea

karena teknologi keamanan yang dimilikinya yaitu sistem pertahanan anti-rudal berhulu ledak nuklir.

Nuklir merupakan teknologi senjata yang paling mengancam yang pernah ada selama peradaban hidup manusia saat ini. Satu buah nuklir saja jika diluncurkan dapat menghancurkan sebuah negara bahkan benua. Nuklir dapat menyebabkan terjadinya sebuah gelombang ledakan yang sangat dahsyat dan dapat mengakibatkan rusaknya atmosfer bumi (Massey, 1963). Hal ini yang menjadi kekhawatiran AS apabila setiap negara memiliki nuklir dan kemudian terjadi peperangan, hal ini dapat mengakibatkan kehancuran dimana-mana. Bagi AS terdapat negara yang harus diawasi dalam pengembangan senjata nuklirnya seperti: Iran, Pakistan, dan Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara yang diwaspadai oleh AS, karena Korea Utara setiap tahunnya terus mengembangkan kekuatan nuklirnya (Christiastuti, 2017). Korea Utara terus melakukan uji coba nuklirnya di Semenanjung Korea sehingga Korea Selatan merasa terancam. Permasalahan di Semenanjung Korea memiliki intensitas konflik yang cukup memanas hingga pada saat ini. Konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Selatan di wilayah tersebut diawali oleh sejarah Perang Dingin yang bersaing dalam penyebaran kekuatan ideologi antara blok barat dan blok timur.

Pasca perang dingin intensitas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tersebut belum juga membaik (Yang & Mas'ood, 2005). Masalah utama saat ini di wilayah tersebut yaitu ancaman nuklir Korea Utara dan kegiatan dari reaktor nuklir yang tidak transparan menjadikan situasi di Semenanjung Korea tidak menentu. Korea Selatan yang menjadi negara tetangga Korea Utara tentu merasa terancam dengan keberadaan senjata nuklir Korea Utara (Yang & Mas'ood, 2005). Melihat agresivitas Korea Utara yang mengembangkan persenjataan nuklirnya, AS kemudian memberikan respon dengan mengembangkan Program Pertahanan Rudal Global miliknya yang dimulai sejak tahun 1994. Inovasi terbaru yang telah dibuat AS pada saat ini dalam pengembangan teknologi keamanan udara adalah dengan membuat sistem pertahanan anti rudal balistik jarak pendek, menengah, maupun jauh yang dinamakan dengan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*. Sistem pertahanan ini merupakan sistem yang difungsikan sebagai perisai pertahanan berlapis untuk melindungi suatu wilayah dari ancaman rudal (Syah, 2015). AS sebagai mitra Korea Selatan kemudian ikut menjadi aktor dalam permasalahan antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam konflik di Semenanjung Korea. Pada tanggal 8 Juli 2016, AS dan Korea Selatan resmi melakukan kerjasama dalam penempatan THAAD di Semenanjung Korea guna mencegah serangan rudal balistik yang diprediksi datang dari Korea Utara. Perjanjian tersebut disetujui oleh Presiden AS, Barrack Obama, dan Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye.

Penempatan THAAD di Korea Selatan tersebut kemudian menuai kontroversi atas kepentingan AS. Penempatan THAAD di Korea Selatan atas kerjasama pertahanan antara Korea dan AS dianggap banyak negara terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan penyelesaian masalah di Semenanjung Korea. Tiongkok sebagai negara terdekat dari wilayah Semenanjung Korea menambahkan bahwa, penempatan THAAD dinilai tidak meminimalisir intensitas konflik di wilayah tersebut, melainkan menambah situasi semakin *chaos* (Kai, 2016). Pernyataan tersebut juga diikuti oleh kecemasan Tiongkok atas ancaman yang datang dari kerjasama pertahanan dan penempatan

THAAD tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kawasan Asia Timur (Kai, 2016).

Tiongkok sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis di wilayah Semenanjung Korea merasa terganggu dan menentang keras dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh AS di Semenanjung Korea ini. Ditematkannya THAAD di Semenanjung Korea akan berakibat buruk terhadap pertahanan Tiongkok (Novosti, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut maka muncul sebuah pertanyaan yakni bagaimana respon pertahanan Tiongkok terhadap penyebaran sistem pertahanan anti rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi terdahulu, penulis menggunakan beberapa artikel dari jurnal internasional sebagai perbandingan sudut pandang yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang dinamika politik di Semenanjung Korea yang menjadi sejarah perebutan kekuasaan antara Semenanjung Korea bagian utara dan Semenanjung Korea bagian selatan.

Literatur pertama adalah tulisan yang berjudul "The ROK-US Joint Political and Military Response to North Korea Armed Provocations" yang ditulis oleh Sung Chool Lee, menjelaskan dinamika politik di Semenanjung Korea terjadi karena tindakan agresif militer Korea Utara dalam bentuk provokasi senjata nuklirnya sehingga memicu pembentukan aliansi oleh kedua Korea, yaitu Korea Utara yang beraliansi dengan Tiongkok dan Rusia sementara Korea Selatan memilih beraliansi dengan Amerika Serikat (Lee, 2011).

Keberadaan aliansi Tiongkok dengan Korea Utara, ditambah dengan tindakan agresif dan provokatif, membuat Korea Selatan membangun aliansi dengan Amerika Serikat guna mengimbangi kekuatan militer Korea Utara dan Tiongkok di kawasan Semenanjung Korea. Namun demikian, Sung Chool Lee juga menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki peranan penting sebagai pihak penengah yang berupaya meredakan tensi antara kedua Korea. Baik Korea Selatan maupun Utara yang terlibat perseteruan ideologi dan konflik bersenjata sejak tahun 1950, mereka tidak melakukan perjanjian damai permanen, melainkan gencatan senjata, yang sewaktu-waktu bisa batal dan menimbulkan konflik (Lee, 2011).

Pada akhirnya, penjelasan tersebut mengarah pada tindakan Korea Utara dengan provokasi bersenjata. Penelitian ini memberikan informasi penting terkait latar belakang aliansi di wilayah Asia Timur yang berujung pada pengembangan senjata nuklir, keterlibatan negara-negara besar dalam situasi keamanan regional serta mengarah pada alasan mengapa Amerika Serikat melakukan pemasangan THAAD di Korea Selatan mengingat negara tersebut merupakan sekutu Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan ini terletak pada fokus kajian yang dibahas, dimana penelitian ini membahas bagaimana respon pemerintahan Tiongkok terhadap pemasangan THAAD di Korea Selatan, sedangkan penelitian oleh Sung Chool Lee lebih membahas provokasi Korea Utara di Semenanjung Korea (Lee, 2011).

Artikel kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Farel Akbar Pramantya dengan judul "Alasan Tiongkok Menolak Pembangunan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan Tahun 2016". Dalam tulisannya, Farel menjelaskan terdapat

2 hal utama yang menyebabkan Tiongkok menolak keberadaan THAAD. Pertama, Tiongkok mempercayai bahwa instalasi THAAD dapat mendorong adanya Security Dilemma antara Korea Utara dan Korea Selatan serta memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk memberikan pengaruh lebih di Kawasan. Tiongkok percaya bahwa Tindakan untuk menempatkan THAAD justru dapat membuat Korea Utara tersinggung karena dianggap akan meluncurkan senjata nuklirnya yang padahal menurut Tiongkok, Korea Utara tidak berniat untuk menggunakan nuklirnya dan Tindakan tersebut justru akan mendorong perlombaan senjata nuklir (Bramantya, 2019).

Tiongkok menganggap melalui THAAD, Amerika Serikat berusaha mengantisipasi pergerakan Tiongkok sebagai major power dengan perekonomian yang meningkat. Tiongkok tidak dapat mendorong pembangunan nasional jika terdapat ketidakamanan di Kawasan. Kedua, Tiongkok waspada dengan adanya keputusan sepihak untuk merancang THAAD karena sejak awal Tiongkok lebih awal mencetuskan solusi diplomasi untuk mengatasi ketegangan nuklir Korea Utara. Korea Utara sendiri merupakan kawan potensial Tiongkok dengan banyak kerjasama. Oleh karena itu, Tiongkok berusaha menggunakan upaya diplomasi guna menghindari ketegangan yang timbul dari Korea Utara. Artikel ini memberikan informasi penting terkait alasan Tiongkok menolak keberadaan THAAD melalui perspektif keamanan dan ekonomi. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian yang dibahas, dimana penelitian Farel fokus terhadap alasan Tiongkok menolak keberadaan THAAD, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan pada respon keamanan dari Tiongkok terhadap isu THAAD di Korea Selatan (Bramantya, 2019).

Artikel ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Robert C. Watts IV yang berjudul "Rockets 'Red Glare'- Why Does China Oppose THAAD in South Korea, and What Does It Mean for U.S. Policy?". Dalam tulisannya, Watts menjelaskan mengenai respon Tiongkok terhadap rencana instalasi THAAD di Semenanjung Korea oleh Amerika Serikat. Rencana tersebut langsung diberikan tanggapan berupa penentangan dari Tiongkok. THAAD dianggap sebagai sebuah ancaman yang substansif terhadap kepentingan keamanan Tiongkok. Watts menjelaskan tiga alasan utama Tiongkok menentang instalasi THAAD (Watts IV, 2018).

Pertama, THAAD dinilai melebihi kebutuhan keamanan Korea Selatan dan akan memicu perlombaan senjata di Semenanjung Korea. Kedua, radar THAAD diklaim oleh Tiongkok akan mengancam keberadaan nuklir Tiongkok dan mengganggu keseimbangan strategis. Ketiga, Tiongkok merasa bahwa penerapan sistem pertahanan rudal canggih di Korea akan memperkuat dan membentuk kembali aliansi Amerika Serikat di *Northeast Asia*, baik dengan memperkuat aliansi dengan Korea Selatan dan dengan membina hubungan keamanan trilateral AS-Korea-Jepang (Watts IV, 2018).

Dalam penempatannya, THAAD akan di posisikan di daerah Seongju, Korea Selatan. Posisi ini merupakan tempat yang dianggap strategis dalam penempatan instalasi THAAD. Penempatan ini sama sekali tidak menjadi fokus utama yang menjadi faktor penentangan terhadap pengadaan THAAD, akan tetapi perhatian dari pihak Tiongkok ada pada kapasitas radar dari AN/TPY-2 dengan X-band-nya yang menjadi salah satu alasan penentangan tersebut. Dengan estimasi jarak hingga 3000km, radar tersebut sudah dengan mudah dapat melacak persenjataan Tiongkok secara langsung meskipun tidak dengan keseluruhan. Bagi Tiongkok, dengan estimasi jarak deteksi dari radar THAAD wilayah bagian timur dan utara Tiongkok akan menjadi wilayah yang

masuk dalam cakupan radar THAAD, sementara wilayah ini merupakan wilayah yang strategis sebagai lokasi dari sistem pertahanan dan penempatan perangkat-perangkat militer dari Tiongkok (Watts IV, 2018).

Wilayah-wilayah seperti Nanjing dan Shenyang merupakan salah satu daerah yang menjadi daerah cakupan radar dari THAAD sementara daerah tersebut merupakan bagian dari penempatan-penempatan perangkat militer dari Tiongkok, bagian dari angkatan darat, udara, laut, bahkan pengembangan misil ada pada daerah ini. Salah satu pernyataan dari duta besar Tiongkok untuk Korea Selatan menunjukkan bagaimana posisi dan sikap Tiongkok terhadap pengadaan THAAD di Korea Selatan, Qiu Guohong menegaskan bahwa hubungan baik yang dibangun kedua negara merupakan capaian yang positif namun dengan keputusan Korea Selatan untuk menempatkan THAAD di negaranya akan menghadirkan masalah bagi kedua negara, Qiu menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat secara seketika menghancurkan hubungan Tiongkok dan Korea Selatan. Tidak berhenti sampai disana, penentangan Tiongkok terhadap pengadaan THAAD di Korea Selatan menjadi penguat dari timbulnya masalah dalam hubungan ekonomi kedua negara, munculnya isu anti-THAAD hingga *anti-Korean* membuat perkembangan hubungan keduanya menurun (Watts IV, 2018).

Selain menjelaskan mengenai tiga alasan utama Tiongkok menentang instalasi THAAD serta respon Tiongkok terhadap isu tersebut, Watts juga membahas mengenai implikasi kebijakan bagi Amerika Serikat. Menurut Watts, Amerika Serikat harus menghargai kepedulian Tiongkok tentang potensi dampak THAAD pada penangkal nuklirnya dan mengambil langkah untuk meyakinkan Tiongkok tentang tujuan terbatas dari program pertahanan rudal milik Amerika Serikat. Bahkan jika Amerika Serikat ingin menggunakan pertahanan rudal untuk mempertahankan diri dari serangan nuklir Tiongkok, dengan menambahkan radar AN/TPY-2 ke Semenanjung Korea tidak mengubah informasi ancaman yang tersedia untuk sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa diambil oleh Amerika Serikat untuk meyakinkan Tiongkok tentang dampak THAAD pada penangkal nuklirnya, yakni melalui analisis teknis bersama program pertahanan rudal Amerika Serikat dan mengundang pengamat Tiongkok untuk memantau pengujian sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (Watts IV, 2018).

Karya Watts sangat membantu penulis untuk memahami alasan mengapa Tiongkok menentang instalasi THAAD di Semenanjung Korea. Perbedaan yang terdapat dari karya Watts dan penelitian ini pada fokus pembahasannya. Watts berfokus kepada alasan Tiongkok menentang instalasi THAAD dan implikasi kebijakan bagi Amerika Serikat, sedangkan penulis berfokus pada strategi Tiongkok dalam melakukan pertimbangan kekuatan atau yang lebih dikenal dengan *balance of power* untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menggunakan metode pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan metode deduktif. Artinya, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai referensi kemudian dikaji lagi secara spesifik dan mendalam guna menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Data data yang digunakan dalam penelitian

ini bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar cetak maupun elektronik kredibel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis, dokumen ataupun jurnal internasional, serta sumber informasi lainnya. Fokus sumber data penulis yaitu dari *website* resmi pemerintah Amerika Serikat maupun China, *press release* yang berasal dari pemerintah, dan portal media yang meliput langsung mengenai perkembangan permasalahan keamanan di Kawasan Asia Timur. Setelah terkumpul, data yang sesuai dengan keperluan penelitian akan diseleksi untuk selanjutnya dikelompokkan dalam pembahasan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Stephen M. Waltz melalui teori *Balance of Threat* dalam buku *The Origins of Alliances* menyertakan elemen ancaman yang secara detail dijelaskan melalui variabel *aggregate power*, *geographical proximity*, *offensive power* dan *aggressive intentions*. Maka pada akhirnya teori ini bertujuan untuk menentukan pilihan strategi dari sebuah negara guna merespon ancaman eksternal, yaitu strategi *balancing* atau *bandwagoning* (Waltz, 1987, p. 263). Dalam penelitian ini dipilih teori *Balance of Threat* guna menjelaskan objek penelitian penulis yaitu China yang merasa terancam sebagai variabel dependen. Sementara penyebaran sistem pertahanan anti-rudal THAAD di semenanjung Korea, sebagai variabel independen.

Variabel pertama, kekuatan agregat (*aggregate power*) yang dimaksudkan oleh Waltz adalah total sumber daya suatu negara dengan jumlah yang paling besar. Meliputi populasi, pengeluaran militer (*military expenditure*), GDP, dan penguasaan teknologi. Makin besar *aggregate power* suatu negara, maka semakin besar pula ancaman yang ditimbulkan untuk negara lain (Dwivedi, 2012). Lalu variabel kedua, kekuatan ofensif, dengan indikator jumlah personel, kepemilikan nuklir, dan persenjataan lain non-nuklir. Variabel ketiga, kedekatan geografis, yaitu jarak geografis antara negara. Semakin dekat jarak antar pengancam dengan negara yang terancam, maka semakin besar potensi ancaman yang dihasilkan. Menurut Waltz, ketika suatu negara yang mengancam berdekatan secara geografis, hal tersebut menimbulkan respon bagi negara lain di sekitarnya untuk melakukan aliansi (Dwivedi, 2012). Kemudian variabel keempat, *aggressive intentions*, diartikan sebagai maksud sebuah negara yang bersifat agresif dan dapat memprovokasi negara lain untuk melakukan perimbangan kekuatan untuk melawannya. Maksud atau niat suatu negara tidak dapat dilihat secara jelas. Namun dapat dilihat dari kebijakan negara tersebut. Dalam membahas variabel *aggressive intentions*, Waltz memberi contoh ketika Jerman yang ketika itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Ketika Hitler menerapkan kebijakan ekspansionis dan disertai peningkatan kapabilitas militer yang agresif, maka negara-negara di sekitarnya akan terpengaruh untuk membangun aliansi guna melawan agresivitas Jerman (Dwivedi, 2012).

Penulis akan membahas variabel-variabel penelitian melalui beberapa indikator yang terdapat dalam teori *Balance of Threat* dalam penelitian ini. Empat variabel utama dalam penelitian ini di antaranya kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan intensi agresif. Pada variabel pertama yaitu kekuatan agregat, kekuatan agregat akan menjelaskan perbandingan kekuatan atau lebih tepatnya kapabilitas militer antara China dengan Amerika Serikat. Penjelasan lebih lanjut tentang kekuatan agregat terdapat beberapa indikator yang digunakan yaitu populasi penduduk, pendapatan GDP, belanja militer, dan penguasaan teknologi.

Variabel kedua yaitu kedekatan geografis, digunakan penulis untuk menjabarkan kedekatan antara letak instalasi sistem pertahanan anti rudal THAAD di Korea Selatan dengan Tiongkok secara geografis. Selanjutnya pada variabel ketiga kekuatan ofensif, penulis akan menjelaskan seberapa besar kapabilitas militer yang dimiliki AS dan negara yang berkontribusi dalam program THAAD yaitu Korea Selatan. Kapabilitas militer tersebut meliputi kepemilikan senjata nuklir (*nuclear possession*), jumlah personel militer, serta alat utama sistem persenjataan atau alutsista non-nuklir yang dimiliki. Dan kemudian variabel terakhir, intensi agresif, akan menjelaskan tentang kebijakan AS yang bersifat agresif, khususnya di kawasan Semenanjung Korea.

Keempat variabel di atas, beserta indikator indikatornya akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan besarnya ancaman AS bagi Tiongkok. Teori *Balance of Threat* ini bertujuan untuk menjelaskan Tiongkok mendapatkan ancaman dari AS dengan membandingkan kekuatan antara kedua negara tersebut. AS sebagai sumber ancaman dengan memainkan perannya di kawasan semenanjung korea melalui kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dengan Korea Selatan. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi Tiongkok untuk mengambil langkah defensif dengan meningkatkan kapabilitas militernya dan bekerjasama dengan negara lain untuk membendung kekuatan AS di Semenanjung Korea (Fokus Today, 2017).

Tabel 1. Operasionalisasi Teori

Teori	Variabel Independen	Variabel <i>Balance of Threat Theory</i>	Indikator	Operasionalisasi
<b>Balance of Threat</b>	Program sistem pertahanan anti rudal THAAD di Semenanjung Korea	Kekuatan Agregat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Populasi</li> <li>- Pendapatan GDP</li> <li>- Belanja militer</li> <li>- Penguasaan Teknologi</li> </ul>	Perimbangan empat indikator kekuatan agregat Tiongkok dan Amerika Serikat
		Kekuatan Ofensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah angkatan bersenjata</li> <li>- Alutsista</li> <li>- Kepemilikan Nuklir</li> </ul>	Perimbangan tiga indikator kekuatan ofensif Tiongkok dan Amerika Serikat
		Kedekatan Geografis (Geopolitik)	Jarak atau posisi pengancam dan negara terancam	Jarak Geografis Tiongkok dengan sumber ancaman (AS)

		Intensi Agresif	Kebijakan agresif /ekspansionis	Kebijakan ekspansionis AS
	<b>Variabel Dependen</b>			
	Respon China		- Peningkatan Kapabilitas Militer - Bekerjasama dengan negara lain	Perilaku Tiongkok dalam menanggapi ancaman, yaitu dengan meningkatkan kapabilitas militernya dan bekerjasama dengan negara lain

Sumber : Hasil olahan penulis dari berbagai sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Sistem Pertahanan Anti Rudal THAAD di Semenanjung Korea oleh AS menjadi ancaman bagi Tiongkok. Untuk mengantisipasi hal tersebut Tiongkok melakukan upaya *balancing strategy* dengan meningkatkan kapabilitas militernya dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Berdasarkan dengan kerangka teori *Balance of Threat* yang menjelaskan tentang bagaimana respon yang dilakukan oleh sebuah negara dalam mengimbangi besarnya ancaman dari negara lain yaitu dengan melalui sebuah opsi strategi. Opsi yang dimaksud adalah negara yang diancam dapat melakukan strategi *balancing* yaitu dengan meningkatkan kapabilitas militernya atau dengan melakukan kerjasama dengan negara di luar negara asal ancaman. Negara yang terancam dapat memilih negara yang memungkinkan dan mumpuni untuk diajak bekerja sama dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh negara pengancam. Berikut ini merupakan respon Tiongkok terhadap penempatan THAAD oleh Amerika Serikat di Korea Selatan:

- **Meningkatkan Kapasitas Militer**

Perkembangan kapabilitas militer negara merupakan hal yang sangat penting dianggap oleh Tiongkok yang saat ini disebut sebagai negara *rising power* setiap tahunnya terus meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja militer Tiongkok dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 anggaran belanja militer Tiongkok berjumlah sebesar 30 juta USD yang kemudian meningkat tajam menjadi 228 juta USD pada tahun 2017 (Global Fire Power, 2017). Anggaran belanja militer Tiongkok termasuk anggaran belanja militer terbesar ke dua di dunia setelah anggaran belanja militer AS. Walaupun anggaran belanja militernya masih berada di bawah Amerika Serikat, namun secara kuantitas peningkatan anggaran belanja militer Tiongkok jauh lebih besar dari pada anggaran belanja militer Amerika Serikat.

Data dari SIPRI menjelaskan bahwa anggaran belanja militer Tiongkok pada tahun 1989 hanya sebesar 20,226 miliar dolar AS. Namun, pada tahun 2016 anggaran belanja militernya telah naik sepuluh kali lipat menjadi 215,176 miliar dolar AS. Sementara itu, anggaran belanja militer Amerika Serikat pada tahun 1989 tercatat sebesar 581,392 miliar dolar dan pada tahun 2016 sebesar 611,186 miliar dolar AS. Dengan kata lain, selama kurun waktu 1989-2016 anggaran belanja militer Amerika Serikat hanya naik sebesar 29,794 miliar dolar AS sementara anggaran militer Tiongkok, dalam periode yang sama, naik sebesar 194,950 miliar dolar AS (Taylor & Youngs, 2008, p. 26).

Tiongkok juga melakukan modernisasi peralatan militer (alutsista) yang dimilikinya dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok melakukan pembelian sejumlah tank, pesawat terbang, rudal balistik, dan pengembangan teknologi nuklir dari Rusia, selain itu Tiongkok juga mengembangkan teknologi militer mandiri yang meliputi pengembangan kapal induk *Liaoning*, kapal perang, rudal, dan teknologi nuklir. Tiongkok juga melakukan pengembangan teknologi militer terbaru seperti pengembangan sejumlah kapal perang, pesawat dan misil balistik. Selain itu, pengembangan industri militer dalam negeri Tiongkok juga berjalan cukup pesat. Hal ini karena banyaknya perusahaan di bidang militer yang memiliki kemampuan dalam memproduksi berbagai macam alutsista yang dibutuhkan oleh ketiga matra angkatan bersenjata RRT (darat, laut dan udara).

Pada tahun 2017, Tiongkok telah memiliki 11 perusahaan yang bergelut di bidang industri militer. Mereka adalah AECC (*Aero Engine Corporation of China*), AICC (*Aviation Industry Corporation of China*), CASC (*China Aerospace Science and Technology Corporation*), CASIC (*China Aerospace Science and Industry Corporation*), CETGC (*China Electronics Technology Group Corporation*), CNECC (*China Nuclear E&C Group*), CNIGC (*China North Industries Group Corporation*), CNNC (*China National Nuclear Corporation*), CSGC (*China South Industries Group Corporation*), CSIC (*China Shipbuilding Industry Corporation*), dan CSSC (*China State Shipbuilding Corporation*). Perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai macam jenis alutsista, seperti anti-ship missiles, bombers, early warning aircraft, firearms, frigates, jet tempur, kapal selam, main battle tanks, self-propelled artillery, supply ships, dan transport aircraft.

Kemampuan Tiongkok dalam memproduksi berbagai jenis alutsista kemudian berimplikasi terhadap penurunan impor senjata. Jika pada awal tahun 2000-an Tiongkok menduduki posisi pertama sebagai negara importir senjata terbesar di dunia, kini pada periode 2012-2016 posisi tersebut turun di peringkat empat dengan global share sebesar 4,5% di bawah India (13%), Arab Saudi (8,2%), dan Uni Emirat Arab (4,6%). Dengan kata lain, impor alutsista Tiongkok turun sebesar 11 persen antara periode 2007-2011 ke periode 2012-2016 (Eric Baculinao, 2018).

Keberhasilan Tiongkok dalam memproduksi berbagai jenis alutsista telah membawa Tiongkok menjadi negara eksportir alutsista terbesar ketiga di dunia di belakang Amerika Serikat (33%) dan Rusia (23%). SIPRI mencatat bahwa nilai ekspor alutsista Tiongkok naik sebesar 74 persen dari periode 2007-2011 ke periode 2012-2016 atau secara global naik dari 3,8 persen menjadi 6,2 persen. Jika pada periode 2007-2011 ekspor alutsista Tiongkok dapat dinikmati oleh 38 negara kini

pada periode 2012-2016 ekspor alutsistanya telah merambah ke 44 negara. 71 persen alutsistanya diekspor ke Asia dan Oceania, 22 persen ke negara - negara di Benua Afrika sementara 1,7 persen lainnya diekspor ke Timur Tengah (Eric Baculinao, 2018).

Untuk jumlah tentara sendiri, dalam kurun waktu 10 tahun Tiongkok melakukan pemangkasan terhadap jumlah tentara. Walaupun Tiongkok sempat beberapa kali melakukan pengurangan jumlah personel angkatan bersenjata, namun sampai saat ini angkatan bersenjata Tiongkok masih menjadi angkatan bersenjata yang terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2016, Tiongkok tercatat memiliki 2.333.000 tentara aktif (yang terdiri dari 1.600.000 PLAA, 235.000 PLAN, 398.000 PLAF, dan 100.000 PLASAF), 660.000 pasukan paramiliter, dan 510.000 pasukan cadangan.

Adapun alasan adanya peningkatan kapabilitas militer Tiongkok ini salah disebabkan karena keinginan untuk menjaga kedaulatan dan membendung dominasi Amerika Serikat di Asia Pasifik di mana sebaran pasukan bersenjata Amerika Serikat dapat ditemukan antara lain di Korea Selatan, Jepang, Guam, Filipina, Australia dan Singapura. Keberadaan militer Amerika Serikat di Korea Selatan merupakan warisan dari sisa-sisa Perang Korea yang berlangsung sejak tahun 1950-1953. Gencatan senjata yang berlangsung sejak tahun 1953 sampai dengan hari ini menyebabkan masih beroperasinya sekitar 28.500 personel militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Mereka tersebar di wilayah Cinhae, Kunsan, dan Osan. Terlebih dengan adanya penempatan THAAD yang berpotensi mengancam keamanan Tiongkok mengharuskan negara tersebut untuk terus meningkatkan kapasitas militernya.

Di waktu yang bersamaan, terdapat ancaman lain selain THAAD seperti sengketa wilayah di Laut Natuna Utara, perebutan wilayah Arunachal Pradesh, Sikkim, dan Aksai Chin di perbatasan sekitar Himalaya yang diperebutkan oleh Tiongkok dan India, sengketa kepemilikan kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dengan Taiwan serta empat negara di Asia Tenggara (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam). Potensi ancaman yang akan dihadapi oleh Tiongkok di masa datang menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, postur militer yang tangguh dan modern diperlukan Tiongkok untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya dari proyeksi multidimensi ancaman yang akan dihadapinya kelak baik berupa ancaman yang datang dari dalam maupun luar negaranya. Dengan demikian, keberadaan THAAD sebagai upaya dominasi Amerika Serikat di Asia Pasifik khususnya di Asia Timur, diikuti oleh ancaman kedaulatan nasional mendorong Tiongkok terus mengupayakan penguatan kapasitas militer (Habiburrahman & Pazli, 2017).

- **Memperkuat Kerjasama Militer**

Sebelum adanya penyebaran sistem pertahanan anti rudal THAAD AS di Korea Selatan, Tiongkok telah lebih dulu mengambil tindakan untuk mengantisipasi instalasi sistem pertahanan anti rudal tersebut dengan melakukan kerjasama bersama Rusia dalam peningkatan persenjataan militernya. Pada bulan November 2014, Tiongkok telah menandatangani kontrak pasokan S-400 Triumf. S-400 Triumf ini adalah sistem rudal anti pesawat jarak jauh yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik jarak menengah, dan juga bisa digunakan

untuk melakukan serangan darat. S-400 dapat menempuh jarak hingga 400 km dan ketinggian hingga 30 km (Greater Jakarta, 2018a). S-400 Triumf ini mulai dikirim ke Tiongkok di awal tahun 2018 lalu. Pada tahun 2017 sebelumnya juga Rusia telah melatih sekelompok prajurit militer Tiongkok untuk menggunakan sistem S-400.

Kerjasama militer antara Tiongkok dan Rusia di bidang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan ini sangat penting. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu meningkatkan penguasaan terhadap teknologi, terutama untuk menunjang keamanan pertahanan kedua negara. Hingga saat ini Tiongkok dan Rusia sedang mengembangkan sejumlah sistem pertahanan anti rudal untuk menandingi THAAD yang disebut dengan S-500 *Prometheus*. S-500 *Prometheus* ini adalah generasi terbaru dari sistem pertahanan udara yang sedang dikembangkan. Tiongkok dan Rusia berusaha untuk secara signifikan menciptakan S-500 ini lebih unggul dari karakteristik sistem THAAD buatan AS (Habiburrahman & Pazli, 2017). Dibandingkan dengan sistem S-400, sistem baru ini akan dibuat berbeda secara konstruktif dan teknis, sistem ini akan memiliki stasiun radar dan alat komputasi baru, termasuk rudal anti-pesawat terbaru.

Hal penting lainnya adalah mode operasi dasar di sistem S-500 akan otomatis. Artinya, intervensi operator manusia dalam operasi tempur dimungkinkan, namun mode dasar semua fasilitas S-500 akan terpisah dan secara keseluruhan sistem ini otomatis. S-500 ini akan dibuat sebagai versi lanjutan dari S-400 dengan komponen khusus yang dirancang untuk mencegat rudal balistik pada ketinggian hingga 200 km. S-500 ini diperkirakan akan memiliki jangkauan luas hingga 600 km (lebih dari 370 mil) dan sekaligus mampu melibatkan hingga 10 target. Sistem ini mampu menghancurkan target hipersonik dan balistik. Sistem rudal pertahanan udara S-500 *Prometheus* ini akan memasuki tahap penelitian dengan *Russian Aerospace Forces* (VCS) pada tahun 2019-2020 setelah selesainya pengujian (Greater Jakarta, 2018b).

Tiongkok saat ini juga sedang berinvestasi besar dalam memenuhi ambisinya untuk menandingi kekuatan militer Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi Tiongkok menyebabkan Tiongkok bersedia mengeluarkan anggaran militer yang sangat besar yakni penelitian dan pengembangan rancangan pesawat hipersonik, senjata futuristik yang lebih cepat untuk menghadapi teknologi militer Amerika, serta mampu melewati sistem pertahanan secanggih apapun. Pesawat hipersonik mampu membawa rudal nuklir dan melaju di atas Mach 5 (lima kali dari kecepatan suara). Pada Agustus 2018, Akademik Aerodinamika dan Luar Angkasa Tiongkok mengklaim berhasil melakukan penerbangan uji coba pertama pesawat 'Starry-Sky-2' dengan teknologi *Waverider* (kemampuan dalam menunggangi gelombang untuk menambah kecepatan) di bagian Barat Tiongkok. Dalam uji coba perdana tersebut, pesawat hipersonik itu berhasil melakukan beberapa putaran, mencapai ketinggian di Mach 6 yang setara dengan 7.344 km/jam dan mampu mendarat dengan sempurna di area yang telah ditentukan (CNN Indonesia, 2018).

Menurut seorang ahli pertahanan Tiongkok di *Australian National University*, Adam Ni menilai pesawat *Starry Sky 2* dapat menambah kekuatan militer Tiongkok. Namun untuk membawa nuklir diperkirakan membutuhkan waktu 3-5 tahun ke depan. Jenderal John Hyten selaku kepala Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat mengakui bahwa kecepatan dan kemampuan manuver dari rudal hipersonik

itu telah berhasil melebihi kemampuan sistem pertahanan Amerika Serikat. Deputi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk Penelitian dan Rekayasa Senjata bernama Michael Griffin menilai Amerika Serikat harus mulai mengembangkan sistem pertahanan generasi baru untuk mengatasi kekuatan senjata hipersonik Tiongkok yang dikatakan memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2018).

Sebagai respon terhadap penyebaran THAAD, Tiongkok juga terus melakukan pengembangan uji coba rudal balistik miliknya yang terbaru yaitu rudal balistik *Dongfeng-41* (DF-41) yang memiliki daya jangkau sejauh 12,000 – 14.000 km yang dapat dilengkapi dengan *nuclear warheads* (Ide, 2017). DF-41 merupakan rudal balistik antar benua (ICBM) dengan ukuran panjang 16,5 meter dan diameter 2,78 meter (Global Security, 2018). DF-41 ini adalah generasi terbaru dan terancang rudal balistik ICBM Tiongkok. Dilengkapi dengan hulu ledak nuklir tunggal atau 10 hulu ledak MIRV. DF-41 diperkirakan mampu menyerang 10 kota sasaran di AS dalam sekali peluncuran. Rudal balistik DF-41 ini memiliki bobot seberat 80 ton (“Kebangkitan Militer China,” 2015, p. 75).

Seiring dengan perluasan proyeksi AS di Semenanjung Korea, disertai dengan latihan-latihan militer gabungan yang diadakan oleh AS dan Korea Selatan, maka meningkat pula kerjasama militer yang diadakan oleh Tiongkok dengan negara lain. Menurut AS penempatan Sistem Pertahanan Anti Rudal THAAD di Semenanjung Korea dianggap langkah perlindungan keamanan kawasan, namun hal ini tidak dianggap demikian oleh Tiongkok. Terlebih lagi alasan AS karena ingin melindungi kawasan Korea Selatan dari ancaman serangan rudal oleh Korea Utara. Tindakan AS tersebut dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak biasa (*unusual behaviour*) oleh masyarakat internasional.

Dalam kasus penempatan THAAD di Korea Selatan oleh Amerika Serikat, berdasarkan teori *balance of threat*, Tiongkok sebagai negara yang terancam mengambil langkah dengan melakukan strategi *balancing* untuk membendung kekuatan AS yang memiliki *great power* di Kawasan Asia Timur. Dalam menjalankan strategi *balancing*, Tiongkok harus menentukan langkah yang tepat. Di samping meningkatkan kapabilitas militernya, Tiongkok perlu melakukan kerjasama di bidang militer dengan negara di luar asal ancaman agar dapat mengimbangi kekuatan negara pengancam tersebut. Salah satu negara yang memiliki kapabilitas militer yang kuat dan mumpuni yang memungkinkan untuk diajak bekerjasama oleh Tiongkok adalah Rusia.

Selama hampir dua dekade, Rusia tetap menjadi negara pengeksport militer terbesar di Tiongkok. Perusahaan Rusia telah memperoleh pendapatan substansial dari penjualan industri militernya yang membuat hubungan antara Rusia dan Tiongkok saling menguntungkan (Weitz, 2008, p. 24). Sejak pemerintah kedua negara menandatangani sebuah kesepakatan pada kerjasama teknik militer pada bulan Desember 1992, Tiongkok telah membeli lebih banyak barang pertahanan dari Federasi Rusia daripada dari semua negara lain. Selama tahun 1990-an, nilai pengiriman ini berkisar hingga \$1 miliar per tahun. Memasuki tahun 2008, angka ini mendekati \$2 miliar per tahun. Menurut perkiraan, antara tahun 1992 dan 2006. Nilai total ekspor senjata Rusia ke Tiongkok berjumlah sekitar \$26 miliar. Penjualan ini

membuat Rusia menjadi pemasok senjata terbesar ke Asia antara tahun 1998 dan 2005, jauh di atas AS (Weitz, 2008, p. 25).

Kerjasama militer antara Rusia dan Tiongkok yang meningkat, juga dapat dilihat dari tingkat intensitas diadakannya pertemuan antara perwakilan petinggi pertahanan kedua negara. Pertemuan Pejabat Tinggi Pertahanan Rusia – Tiongkok merupakan hal lumrah. Terlebih lagi ketika kerjasama militer kedua negara dimulai di awal dekade 2000-an. Seperti adanya pertemuan *China-Russia Intergovernmental Joint Commission on Military Technology Cooperation*, antara Wakil Menteri Pertahanan Rusia dengan Wakil Komisi Militer Pusat Tiongkok. Sejak 2010 hingga 2016, pertemuan Pejabat tinggi Pertahanan Rusia dan Tiongkok dapat dikatakan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut seiring dengan urgensi dari beberapa perkembangan situasi keamanan global. Termasuk di antaranya penempatan Sistem Pertahanan Anti Rudal THAAD AS di Semenanjung Korea (Meick, 2017, p. 19).

Dilihat dari latihan militer, bisa dikatakan latihan militer gabungan Rusia-Tiongkok mengalami pergeseran model setelah adanya wacana akan penempatan THAAD di Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara berlangsungnya latihan gabungan *Peace Mission* dengan latihan *Joint Sea*. Di mana sebelumnya latihan gabungan *Peace Mission* berbasis di darat dan berfokus lebih kepada ancaman teror, yang notabene merupakan ancaman internal. Maka latihan gabungan *Joint Sea* lebih berfokus bagaimana penggabungan kedua kekuatan militer kedua negara dalam menghadapi ancaman yang berasal dari luar negeri. Hal ini dapat dilihat mengingat *Joint Sea* dilakukan di perairan yang cenderung berdekatan dengan laut internasional. Di mana ancaman eksternal atau negara lain bermula. Terutama seperti yang diadakan saat mendekati tahun 2016, dengan diadakannya latihan gabungan Angkatan Laut Rusia dan Tiongkok *Joint Sea* tersebut, maka setidaknya Tiongkok menunjukkan kepada rival-rivalnya bahwa bersama dengan Rusia, Tiongkok memiliki kapabilitas dalam mengerahkan tempurnya ke berbagai wilayah guna merespon ancaman.

Rusia dan Tiongkok juga sebelumnya telah memiliki kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan dengan *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*. Dari kerjasama SCO inilah, untuk kali pertamanya setelah Perang Dingin, Rusia dan China mengadakan Latihan Militer Gabungan dengan tajuk “Misi Damai” atau *Peace Mission 2005* (Meick, 2017, p. 34). Latihan militer ini melibatkan gabungan negara-negara anggota *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, yang terbentuk pada tanggal 15 Juni 2001 di Shanghai, Tiongkok dengan anggota yang terdiri dari: Tiongkok, Kazakhstan, Kyrgystan, Rusia, dan Tajikistan (Shanghai Cooperation Organization, 2017).

Latihan Militer Gabungan *Peace Mission 2005* ini dilaksanakan dalam dua fase. Fase pertama dilaksanakan di Timur jauh Rusia, sementara fase kedua dilaksanakan di Provinsi Shandong, Tiongkok. Pada dasarnya, latihan bersama ini ditujukan terlebih untuk kerjasama penanggulangan terorisme, dan penjagaan perdamaian di area regional negara-negara anggota SCO. Namun dalam praktiknya, dalam latihan tersebut terlibat pula beberapa kekuatan, laut, dan udara yang diikuti 8000 prajurit dari China dan 2000 personel dari Rusia. Latihan Militer Gabungan

*Peace Mission* yang dilaksanakan oleh Rusia, Tiongkok dan sebagian negara anggota SCO ini, terus dilakukan setidaknya dua tahun sekali (Meick, 2017, p. 35).

Selain mengadakan latihan gabungan *Peace Mission* yang notabene melibatkan mayoritas elemen dan lokasi di darat, Rusia dan Tiongkok juga melakukan latihan gabungan yang berbasis di perairan. Latihan yang melibatkan Armada Laut kedua negara ini disebut dengan *Joint Sea*. Latihan gabungan Angkatan Laut antara Rusia dan China ini diadakan sejak tahun 2012. Pada latihan pertamanya di tahun 2012, *Joint Sea* diadakan di Qingdao, Tiongkok. Latihan yang diadakan bulan april ini melibatkan 4.000 pelaut China dan 6.000 pelaut Rusia. Ada pun alutsista yang terlibat dalam latihan ini, diantaranya adalah puluhan kapal perang, kapal suplai logistik, dua kapal selam, dan belasan pesawat udara (Meick, 2017, p. 9). Latihan gabungan *Joint Sea* berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Seperti pada tahun 2013 di Teluk Peter The Great, Rusia. Selanjutnya kembali diadakan tahun 2014, berlokasi di Laut Tiongkok Timur. Laut Mediterania menjadi lokasi latihan *Joint Sea* 2015, fase pertama. Dan kemudian dilanjutkan di fase kedua, yaitu di Perairan Clerk Cape Teluk Peter The Great dan dekat Laut Jepang. Dan hingga diadakan di 2016, berlokasi di Perairan Laut China Selatan (Meick, 2017, p. 10).

Dengan permasalahan yang sama, Rusia dan Tiongkok mencoba untuk meningkatkan kerjasama militer kedua negara. Pada Xiangshan Forum di Beijing, Wakil Kepala Staf Gabungan China, Laksamana Sun Jianguo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Antoly Antonov. Kedua tokoh bersepakat menyampaikan kebijakan AS menempatkan sistem pertahanan anti rudal di Asia Timur sangat mengancam keamanan Rusia dan Tiongkok (Chan, 2016). Kepala Staf Umum Militer Rusia, Letnan Jenderal Poznikhir, dalam sebuah Forum Keamanan di Beijing menyatakan akan mengajak Tiongkok untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kemungkinan penggunaan ofensif sistem pertahanan anti-rudal AS yang dibangun di Asia Timur. Kerjasama kedua negara tersebut diharapkan dapat mengimbangi kekuatan AS di kawasan (CBS News, 2016).

Kerjasama pertahanan rudal antara kedua negara ini disebut dengan *Airspace Security*. Latihan militer ini dilakukan sebagai respon atas ancaman yang ditimbulkan oleh program pertahanan rudal AS. Rusia dan Tiongkok pertama kali melakukan latihan militer bersama ini pada bulan Mei tahun 2016, Latihan militer *Airspace Security* bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan anti rudal antara Tiongkok dan Rusia. Sebelum diadakannya kerjasama militer ini, Rusia dan Tiongkok mendesak AS dan Korea Selatan untuk menarik kembali sistem pertahanan anti rudalnya di Semenanjung Korea. Tujuan Tiongkok dan Rusia mengadakan latihan militer bersama ini yaitu untuk menjaga keamanan nasional, perdamaian dan stabilitas Regional Asia Timur (Times of Islamabad, 2017). Latihan militer *Airspace Security* yang kedua kalinya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2017, latihan militer ini berlangsung selama 5 hari. Latihan *airspace security* kali ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan anti rudal antara Tiongkok dan Rusia, termasuk merencanakan operasi pertahanan rudal bersama.

Latihan bersama yang sukses oleh Tiongkok dan Rusia adalah upaya positif yang dilakukan oleh kedua negara untuk menjaga kepentingan keamanan bersama dan keseimbangan strategis regional (Gady, 2017). Juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Tiongkok mengatakan bahwa pihak Tiongkok akan terus

melakukan latihan dan pelatihan khusus, dan melanjutkan dengan uji operasional peralatan dan senjata baru, dengan tegas menjaga keamanan nasional dan perdamaian dan stabilitas regional (Kim, 2017).

Dalam latihan ini, kedua negara mengkombinasikan kekuatan Angkatan Udara Rusia dan Tiongkok, serta kesatuan tugas Pertahanan Rudal. Tujuan latihan ini adalah mempersiapkan proteksi dari provokasi serangan rudal baik serangan rudal balistik maupun rudal jelajah. Latihan ini tidak menargetkan pihak ketiga namun lebih kepada tindakan defensif (Catherine Wong, 2016). Mayor Jenderal Cai Jun, dengan Staf Gabungan Departemen Komisi Militer Pusat Tiongkok, mencatat bahwa militer kedua negara mengadakan latihan anti-rudal pertama mereka dengan simulasi komputer di Moskow, dengan tujuan melatih kemampuan kedua negara dalam sendi pertahanan udara dan tindakan pertahanan rudal (China Daily, 2016).

Dilihat dari respon negara yang terancam, ada satu sifat dari bentuk respon yang diambil oleh China, yaitu bersifat defensif, karena respon yang diambil berwujud peningkatan kerjasama bilateral dengan Rusia di bidang militer sebagaimana yang ditegaskan oleh pengamat militer Tiongkok. Wakil Komandan Angkatan Laut Tiongkok, Bai Yaoping juga menegaskan bahwa kerjasama militer Rusia dan Tiongkok merupakan upaya bersama untuk menjaga stabilitas internasional dan Kawasan. Tiongkok menganggap bahwa respon yang dilakukan dengan memfokuskan pada aspek militer merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan AS memiliki pengaruh besar khususnya pengaruh di dalam bidang militernya yang tersebar di Kawasan Asia Timur, salah satunya dengan penempatan THAAD di Korea Selatan. Dengan adanya proyeksi kekuatan AS di Asia Timur ini membuat Tiongkok harus melakukan sebuah strategi yang tepat. Untuk membendung pengaruh kekuatan AS di kawasan Asia Timur.

Tiongkok kemudian melakukan strategi *balancing*. Strategi *balancing* yang telah dilakukan Tiongkok dengan meningkatkan kapabilitas militer, meningkatkan persenjataan militer, dan meningkatkan kerjasama militernya dengan Rusia akan membuat Tiongkok menjadi negara yang kuat mengingat Tiongkok dan Rusia sama-sama menentang keberadaan THAAD di Korea Selatan. Strategi ini akan membuat AS memikirkan kembali langkahnya untuk memperluas proyeksi kekuatannya di Kawasan Asia Timur sehingga kontak senjata atau konfrontasi militer di antara kedua negara semakin minim. Adapun dalam pengambilan atau pemilihan strategi *balancing* juga dipengaruhi oleh hal-hal lainnya seperti: karakteristik kepemimpinan, dan kondisi dalam negeri yang meliputi politik, ekonomi, dan keamanan. Karena bagaimanapun juga, sebuah keputusan suatu negara direncanakan, didiskusikan, hingga diputuskan akan melalui proses-proses yang melibatkan hal-hal di atas.

## KESIMPULAN

Keamanan sebuah negara merupakan suatu tantangan yang menjadi agenda utama bagi negara-negara di dunia. Perilaku Tiongkok yang melakukan strategi *balancing* dengan melakukan peningkatan kerjasama militer dengan Rusia dalam Latihan Pertahanan Rudal Gabungan, merupakan bentuk dari rasa tidak aman Tiongkok terhadap aktivitas yang dilakukan AS di Korea Selatan. Dalam hal ini dibutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan kematangan serta kemandirian segala aspek sumber daya. Strategi *balancing* yang dilakukan Tiongkok melalui peningkatan kapabilitas militer

dan kerjasama militer dalam bentuk Latihan Pertahanan Rudal Gabungan dengan Rusia merupakan strategi yang sesuai untuk menyeimbangkan kekuatan AS di Korea Selatan. Selain itu peningkatan kerjasama militer kedua negara dalam bentuk diadakannya latihan *Joint Sea* yang pertama kali dilaksanakan pada 2012. Jika sebelumnya Latihan Gabungan *Peace Mission* hanya mencegah ancaman internal, maka *Joint Sea* lebih berfokus pada ancaman eksternal. Hal tersebut dikarenakan penggunaan strategi *balancing* akan menguntungkan Tiongkok. Dengan menggandeng Rusia, setidaknya Tiongkok memiliki rekan yang memiliki opini serupa dengan Tiongkok, bahwa AS merupakan ancaman serta gangguan stabilitas regional.

## REFERENSI

- Bramantya, F. A. (2019). *Alasan Tiongkok Menolak Pembangunan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan Tahun 2016* [Universitas Airlangga]. [https://repository.unair.ac.id/87596/1/JURNAL\\_FAREL\\_AKBAR\\_BRAMANTYA\\_071511233077.pdf](https://repository.unair.ac.id/87596/1/JURNAL_FAREL_AKBAR_BRAMANTYA_071511233077.pdf)
- Catherine Wong. (2016, May 4). *China, Russia to hold missile defence drills, amid opposition to US plans to deploy missile shield in South Korea*. South China Morning Post. <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1941117/china-russia-hold-missile-defence-drills-amid>
- CBS News. (2016, October 11). *China & Russia Consider Joint Defense Response to U.S. Missile Shield*. <https://www.cbsnews.com/news/china-russia-consider-defense-response-us-missile-shield/>
- Chan, M. (2016, October 12). *China and Russia close ranks against US missile-defence system*. South China Morning Post (SCMP). <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2027171/china-and-russia-close-ranks-against-us-missile-defence-system>
- China Daily. (2016, October 12). *China-Russia joint missile defense drill set for 2017*. <http://en.people.cn/n3/2016/1012/c90883-9125666.html>
- Christiastuti, N. (2017, December 13). *Kim Jong-Un Bersumpah Jadikan Korut 'Kekuatan Nuklir Terkuat Dunia.'* Detik.Com. <https://news.detik.com/internasional/d-3767280/kim-jong-un-bersumpah-jadikan-korut-kekuatan-nuklir-terkuat-dunia>
- CNN Indonesia. (2018, August 12). *Pesawat Hipersonik China Tembus Semua Sistem Pertahanan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180812032408-113-321582/pesawat-hipersonik-china-tembus-semua-sistem-pertahanan>
- Dwivedi, S. S. (2012). Alliances In International Relations Theory. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 1(8), 224–237. <http://indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2012/August/20.pdf>
- Eric Baculinao. (2018, February 17). *These Chinese military innovations threaten U.S. superiority, experts say*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/these-chinese-military-innovations-threaten-u-s-superiority-experts-say-n848596>
- Fokus Today. (2017, December 1). *Hubungan Semakin Mesra, China dan Rusia Perkuat Kerjasama Pertahanan Udara*. <https://fokustoday.com/2017/12/01/hubungan-semakin-mesra-china-dan-rusia-perkuat-kerjasama-pertahanan-udara/>
- Gady, F. S. (2017, December 19). *China Claims "New Breakthroughs in Anti-Missile Cooperation" with Russia*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2017/12/china-claims-new-breakthroughs-in-anti-missile-cooperation-with-russia/>

- Global Fire Power. (2017). *China Military Strength*.  
[https://www.globalfirepower.com/Country-Military-Strength-Detail.Asp?Country\\_Id=China](https://www.globalfirepower.com/Country-Military-Strength-Detail.Asp?Country_Id=China)
- Global Security. (2018). *Weapons of Mass Destruction (WMD) Dongfeng 41*.  
<https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/df-41.htm>
- Greater Jakarta. (2018a, January 18). *Rusia Mulai Mengirimkan S-400 ke China*.  
<https://jakartagreater.com/rusia-memulai-pengiriman-s-400-ke-china/>
- Greater Jakarta. (2018b, March 3). *Lupakanlah S-400, Rusia Mulai Produksi S-500 Prometheus*.  
<https://jakartagreater.com/lupakanlah-s-400-rusia-mulai-produksi-s-500-prometheus/>
- Habiburrahman, H., & Pazli, P. (2017). Penentangan Tiongkok Terhadap Korea Selatan Dalam Pengadaan Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) Di Korea Selatantahun 2016. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–15.  
<https://www.neliti.com/id/publications/207252/penentangan-tiongkok-terhadap-korea-selatan-dalam-pengadaan-terminal-high-altitu#cite>
- Ide, B. (2017, February 1). *China Steps up Opposition to US Missile Defense System*. VOA News. <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/china-steps-opposition-us-missile-defense-system>
- Kai, J. (2016, August 9). *Time for China to Rethink South Korea Relations? The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/08/time-for-china-to-rethink-south-korea-relations/>
- Kebangkitan Militer China. (2015). *Angkasa Magazine*.
- Kim, O. (2017, April 28). *In Response To THAAD, China Plans "Specific Exercise And Training."* Hankyoreh.  
[http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/792713.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/792713.html)
- Lee, S. C. (2011). *The ROK-US Joint Political and Military Response to North Korea Armed Provocations*. <https://www.csis.org/analysis/rok-us-joint-political-and-military-response-north-korean-armed-provocations>
- Massey, E. E. (1963). *Nuclear Weapon Effects*. Queen's Printer.
- Meick, E. (2017). *China-Russia Military-to-Military Relations: Moving Toward a Higher Level of Cooperation*. [https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China-Russia Mil-Mil Relations Moving Toward Higher Level of Cooperation.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China-Russia%20Mil-Mil%20Relations%20Moving%20Toward%20Higher%20Level%20of%20Cooperation.pdf)
- Novosti, R. (2016, March 22). *Moskow dan Beijing Anggap Penyebaran Sistem THAAD AS Sebagai Ancaman. Russia Beyond*.  
[https://id.rbth.com/news/2016/03/22/moskow-dan-beijing-anggap-penyebaran-sistem-thaad-as-sebagai-ancaman\\_577747](https://id.rbth.com/news/2016/03/22/moskow-dan-beijing-anggap-penyebaran-sistem-thaad-as-sebagai-ancaman_577747)
- Shanghai Cooperation Organization. (2017). *About SCO*.  
[http://eng.sectsco.org/about\\_sco/](http://eng.sectsco.org/about_sco/)
- Syah, E. (Ed.). (2015, January 19). *Sistem Rudal Pertahanan Udara THAAD Amerika Serikat*. Artileri. <http://www.artileri.org/2015/01/sistem-rudal-pertahanan-udara-thaad.html>
- Taylor, C., & Youngs, T. (2008). *China's Military Posture, International Affairs And Defence Section*. House Of Commons Library.  
<https://www.refworld.org/docid/494784d22.html>
- Times of Islamabad. (2017, April 27). *Chinese Military Holds Drills In Response Of THAAD Deployment*. <https://timesofislamabad.com/27-Apr-2017/chinese-military-holds-drills-in-response-of-thaad-deployment>

- Waltz, S. M. (1987). *The Origin of Alliances*. Cornell University Press.
- Watts IV, R. C. (2018). "Rockets' Red Glare"- Why Does China Oppose THAAD in South Korea, and What Does It Mean for U.S. Policy? *Naval War College Review*, 71(2), 1–29. <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol71/iss2/7>
- Weitz, R. (2008). *China-Russia Security Relations: Strategic Parallelism Without Partnership or Passion?*
- Yang, S. Y., & Mas'ood, M. (2005). *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar*. Gadjah Mada University Press.